



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah.
- KEDUA : Target kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;
  3. Mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETIGA** : Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Pelaporan target kinerja dilakukan pada setiap bulan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman [kinerja.kemenkumham.go.id](http://kinerja.kemenkumham.go.id);
  2. Unit Utama dan Kantor Wilayah melakukan evaluasi mandiri terhadap capaian target kinerja di setiap triwulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dimaksud kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan;
  3. Unit Utama melakukan verifikasi laporan target kinerja Kantor Wilayah melalui aplikasi sebagaimana tersebut pada angka 1, tanggal 6 sampai dengan 15 di setiap bulan setelah triwulan berakhir;
  4. Evaluasi capaian target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester melalui Rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA** : Capaian pelaporan target kinerja ditentukan oleh kepatuhan, pelaksanaan, dan pemenuhan data dukung yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:
1. **Warna merah** dengan kriteria belum melakukan *upload* data dukung dan data dukung tidak sesuai target capaian;
  2. **Warna kuning** dengan kriteria data dukung belum memenuhi target capaian;
  3. **Warna hijau** dengan kriteria data dukung telah memenuhi target capaian.
- KEENAM** : Penilaian berdasarkan kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA sebagai berikut:
1. Warna merah dengan nilai 0 sampai dengan 50;
  2. Warna kuning dengan nilai 51 sampai dengan 69;
  3. Warna hijau dengan nilai 70 sampai dengan 100.
- KETUJUH** : Untuk melakukan monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Pembina Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEDELAPAN** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:
1. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah tidak melaksanakan Target Kinerja;
  2. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah telah melaksanakan Target Kinerja tetapi tidak memenuhi capaian kinerja.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY



# TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

**TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023**

| No.                        | Target Kinerja                          | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|----------------------------|---|---|---|---|---|------------------|
| <b>DIVISI ADMINISTRASI</b> |   |   |   |   |   |                  |
| 1                          | Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah | Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022 | Seluruh satker di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP secara utuh meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal | B01 :<br>Menyiapkan Dokumen Perencanaan di lingkungan Kanwil<br><br>B02-B12<br>Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadir dan Ka UPT .<br><br>B06:<br>Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja semester I<br><br>B12:<br>1.Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja semester II<br>2. Evaluasi Kinerja Mandiri | B01:<br>1. Renstra Kantor Wilayah dan UPT<br>2. Renja/RKKL Kanwil dan UPT<br>3. Dokumen PK secara berjenjang dari kanwil sampai dengan UPT<br><br>B02-B12<br>Laporan e-performance [screenshot]<br><br>B06:<br>Dokumen Lkkip semester I<br><br>B12 :<br>Dokumen Lkkip semester II | DIV ADMIN        |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|---|---|---|--|--|------------------|
| 2   | Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | 1.Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP | Nilai maturitas SPIP Kantor Wilayah dan satuan kerja pada level 3 (terdefinisi)   | B01:<br>Koordinasi dengan APiP Kumham  | B01:<br>Laporan Koordinasi   | DIV ADMIN        |
|     |   |   |   | B02:<br>Pelaksanaan <i>Workshop</i> (Bimtek)   | B02:<br>Laporan pelaksanaan <i>Workshop</i> (Bimtek)   |                  |
|     |   |   | B03:<br>1. Pembentukan TIM Penilaian SPIP Kanwil<br>2. Melakukan Sosialisasi /Pendampingan penyusunan Laporan SPIP satuan kerja | B03:<br>1. SK TIM Penilaian SPIP Kanwil dan<br>2. Laporan Sosialisasi /Pendampingan penyusunan Laporan SPIP satuan kerja                       |  |                  |
|     |   |   | <b>B06 :</b><br>Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja   | <b>B06 :</b><br>Laporan Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja  |  |                  |
|     |   |   | B09:<br>Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja   | B09:<br>Laporan Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja  |  |                  |
|     |   |   | B12:<br>Analisis dan evaluasi hasil penyusunan Laporan SPIP satuan kerja  | B12:<br>Laporan analisis dan evaluasi hasil penyusunan Laporan SPIP satuan kerja   |  |                  |
|     |   | 2. Implementasi Manajemen Risiko (MR)                                 | Seluruh satuan kerja melakukan Mitigasi Risiko  | B03:<br>Persiapan pendampingan MR di lingkungan Kanwil:<br>1. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan<br>2. Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penerapan MR | B03: :<br>1. Laporan Hasil Koordinasi dengan BPKP Perwakilan<br>2. Laporan hasil Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penerapan MR              | DIV ADMIN        |
|     |   |   |   | B06-B09:<br>Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM                 | B06-B09:<br>Laporan Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|---|---|---|--|--|------------------|
|     |   |   |   | B12:<br>Evaluasi Penerapan MR  | B12:<br>Evaluasi Penerapan MR  |                  |
| 3   | Seluruh revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja harus mendapat <i>clearance</i> dari Kepala Kantor Wilayah melalui divisi administrasi | Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi | Setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui kantor wilayah  | <p>B03</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT Apabila melakukan usulan revisi anggaran belanja modal harus melalui persetujuan Kantor Wilayah</li> <li>2. Satuan kerja melakukan analisis usulan revisi belanja modal sebelum diusulkan ke kanwil</li> </ol>  | <p>B03</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT Apabila melakukan usulan anggaran harus melalui persetujuan Kantor Wilayah</li> <li>2. Laporan Analisis usulan revisi belanja modal Satuan kerja</li> </ol> | DIV ADMIN        |
|     |   |   | <p>B06</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Wilayah melakukan analisis terhadap revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar sesuai dengan <i>value for money</i></li> <li>2. Membuat berita acara <i>clearance</i> atas usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar akuntabel dan efektif efisien</li> <li>3. Kantor Wilayah mengusulkan seluruh revisi anggaran belanja modal kanwil beserta satuan kerjanya kepada sekretariat jenderal cq Biro Perencanaan dan Biro Keuangan</li> </ol> | <p>B06</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan analisis terhadap usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar sesuai dengan <i>value for money</i></li> <li>2. Membuat berita acara <i>clearance</i> atas usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar akuntabel dan efektif efisien</li> <li>3. Laporan usulan seluruh revisi usulan anggaran belanja modal kanwil beserta satuan kerjanya kepada sekretariat jenderal cq Biro Perencanaan dan Biro Keuangan</li> </ol> |  |                  |
| 4   | Peningkatan jumlah aset berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN dan Memiliki Sertifikat                                   | Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN   | 1.Meningkatnya jumlah aset tanah & bangunan yg tercatat dlm SIMAK   | B03 :<br>Identifikasi, inventarisasi atas aset berupa tanah dan bangunan   | B03 :<br>Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi asset  | DIV ADMIN        |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|--|---|--|--|------------------|
|     |  |  | BMN sebanyak 70%<br><br>2. Bertambahnya sertifikat tanah dan bangunan yang merupakan BMN di lingkungan Kanwil sebesar 70% | B06<br>Koordinasi dengan pihak terkait untuk pengusulan sertifikasi tanah<br><br>B09 :<br>Monitoring dan Evaluasi<br><br>B12 :<br>Laporan Perubahan status aset pada SIMAK BMN   | B06 :<br>Laporan hasil koordinasi terkait pengusulan sertifikat tanah<br><br>B09 :<br>Laporan monitoring dan evaluasi<br><br>B12 :<br>Laporan Perubahan status aset BMN  |                  |
| 5   | Inventarisasi Kebutuhan Revitalisasi gedung dan bangunan dilingkungan Kantor Wilayah | Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan | Setiap usulan dari kanwil terkait revitalisasi gedung dan bangunan telah dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan   | B03 :<br>1. Koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait kelayakan gedung dan bangunan<br>2. Penyusunan TOR/RAB revitalisasi gedung dan bangunan Kantor Wilayah dan Satker<br>3. Pengajuan surat usulan revitalisasi gedung dan bangunan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan | B03:<br>1. Laporan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR<br>2. TOR/RAB revitalisasi gedung dan bangunan Kantor Wilayah dan Satker<br>3. Surat usulan revitalisasi gedung dan bangunan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan | DIV ADMIN        |
| 6   | Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di Wilayah                       | Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah  | Termanfaatkannya aplikasi khusus Unit Utama di lingkungan Kanwil secara optimal (100% )                                   | B03 :<br>Inventarisasi dan identifikasi aplikasi khusus unit utama yang dapat digunakan di satker dan kantor wilayah sesuai bidang tugas masing-masing<br><br>B06 :<br>Pemanfaatan aplikasi khusus dan penyesuaian aplikasi di wilayah ke Pusdatin                                     | B03 :<br>Laporan inventarisasi<br><br>B06 :<br>Dokumen verifikasi  | DIV ADMIN        |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|--|--|---|--|------------------|
|     |  |  |  | B09 :<br>Monitoring dan Evaluasi  | B09 :<br>Laporan Monitoring dan Evaluasi   |                  |
|     |  |  |  | B12 :<br>Laporan  | B12 :<br>Laporan pelaksanaan   |                  |
| 7   | Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel                            | Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya   | Glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya setiap hari                     | B03-B09:<br>1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM<br>2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari | B03-B09:<br>1. Daftar akun Satuan Kerja yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM<br>2. Laporan Bulanan pelaksanaan glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif | DIV ADMIN        |
|     |  |  |  | B12:<br>Monitoring dan Evaluasi   | B12:<br>Laporan Monitoring dan Evaluasi  |                  |
| 8   | Optimalisasi implementasi <i>Corporate University</i> dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang hukum dan HAM | 1. Meningkatnya kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i><br>2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada sistem informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM) | Meningkatnya kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i> (70% dari jumlah pegawai dilingkungan Kantor wilayah) | B03:<br>1. Pembentukan Tim Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM<br>2. Pelaksanaan Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM<br>3. Sosialisasi Sistem Informasi Corpu       | B03:<br>1. SK Tim Pelaksana Corpu<br>2. Laporan pelaksanaan sosialisasi  | DIV ADMIN        |
|     |  |  |  | B06-B09 :<br>1. Penyusunan SK Peserta<br>2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/ <i>Workshop</i> /lokakarya  | B06-B09 :<br>1. SK Peserta<br>2. Laporan pelaksanaan Corpu   |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|---|--|---|--|--|------------------|
|     |   |  |   | B12:<br>1. Penyusunan SK Peserta<br>2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/ <i>Workshop</i> /lokakarya<br>3. Evaluasi pelaksanaan Corpu | B12:<br>1. SK Peserta<br>2. Laporan pelaksanaan Corpu<br>3. Laporan evaluasi pelaksanaan Corpu                               |                  |
| 9   | Tata Kelola digitalisasi Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah | Terlaksananya digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil                                      | Proses digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil sebanyak 50%   | B03 :<br>1. Inventarisasi arsip dinamis dan inaktif yang akan digitalisasi dan dihapuskan<br>2. Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip   | B03 :<br>1. Laporan Inventarisasi arsip manual yang akan digitalisasi<br>2. Laporan hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip | DIV ADMIN        |
|     |   |  |   | B06-B09 :<br>Melakukan digitalisasi arsip  | B06-B09 :<br>Laporan pelaksanaan digitalisasi arsip  |                  |
|     |   |  |   | B12 :<br>Evaluasi arsip yang sudah didigitalisasi  | B12 :<br>Laporan hasil digitalisasi  |                  |
| 10  | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja | Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan | 1. Setiap triwulan kanwil melakukan evaluasi kinerja seluruh satker<br>2. Kanwil memberikan piagam penghargaan kepada satker berkinerja terbaik | B03:<br>kanwil melakukan evaluasi capaian kinerja satker   | B03 :<br>Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja   | DIV ADMIN        |
|     |   |  |   | B06 :<br>kanwil melaksanakan rapat evaluasi kinerja di tingkat Satuan Kerja  | B06 :<br>Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja   |                  |
|     |   |  |   | B09 :<br>kanwil melaksanakan rapat evaluasi kinerja di tingkat Satuan Kerja  | B09 :<br>Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja   |                  |

| No.                                   | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|------------------|
|                                       |  |  |  | B10:<br>1.Penyusunan bahan rakor evaluasi tingkat kementerian<br>2. Pemberian penghargaan kepada satker berkinerja baik   | B10:<br>1.Konsep Bahan Rakor Evaluasi Tingkat Kementerian<br>2. Piagam penghargaan kepada satker berkinerja baik  |                  |
|                                       |  |  |  | B12 :<br>Evaluasi capaian kinerja   | B12 :<br>Dokumen hasil evaluasi capaian kinerja   |                  |
| <b>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b> |  |  |  |   |   |                  |
| 11                                    | Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. | Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. | Terlaksananya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. | B01:<br>SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan | B01:<br>SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan | DIV YANKUM       |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|--|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B02<br/>Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota</p> | <p>B02<br/>Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan:<br/>a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi:<br/>b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B03<br/>Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota</p> | <p>B03<br/>Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan:<br/>a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi:<br/>b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B04<br/> Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>B04<br/> Laporan kegiatan yang melampirkan:<br/> a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa:<br/> 1) Surat Permohonan;<br/> 2) NA atau<br/> 3) Penjelasan/Keterangan<br/> 4) dokumen rapat<br/> 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan<br/> 6) Dokumentasi)<br/> 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan.<br/> b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B05<br/> Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>B05<br/> Laporan kegiatan yang melampirkan:<br/> a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa:<br/> 1) Surat Permohonan;<br/> 2) NA atau<br/> 3) Penjelasan/Keterangan<br/> 4) dokumen rapat<br/> 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan<br/> 6) Dokumentasi)<br/> 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan.<br/> b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B06<br/> Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>B06<br/> Laporan kegiatan yang melampirkan:<br/> a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa:<br/> 1) Surat Permohonan;<br/> 2) NA atau<br/> 3) Penjelasan/Keterangan<br/> 4) dokumen rapat<br/> 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan<br/> 6) Dokumentasi)<br/> 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan.<br/> b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|--|------------------|
|     |                |                       |                     | B07<br>Terasiliasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | B07<br>Laporan kegiatan yang melampirkan:<br>a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa:<br>1) Surat Permohonan;<br>2) NA atau<br>3) Penjelasan/Keterangan<br>4) dokumen rapat<br>5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan<br>6) Dokumentasi)<br>7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat<br>8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan.<br>b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B08<br/> Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>B08<br/> Laporan kegiatan yang melampirkan:<br/> a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa:<br/> 1) Surat Permohonan;<br/> 2) NA atau<br/> 3) Penjelasan/Keterangan<br/> 4) dokumen rapat<br/> 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan<br/> 6) Dokumentasi)<br/> 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat<br/> 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan.<br/> b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B09<br/> Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>B09<br/> Laporan kegiatan yang melampirkan:<br/> a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa:<br/> 1) Surat Permohonan;<br/> 2) NA atau<br/> 3) Penjelasan/Keterangan<br/> 4) dokumen rapat<br/> 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan<br/> 6) Dokumentasi)<br/> 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat<br/> 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan.<br/> b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B10<br/> Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>B10<br/> Laporan kegiatan yang melampirkan:<br/> a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa:<br/> 1) Surat Permohonan;<br/> 2) NA atau<br/> 3) Penjelasan/Keterangan<br/> 4) dokumen rapat<br/> 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan<br/> 6) Dokumentasi)<br/> 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat<br/> 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan.<br/> b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B11<br/> Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>  | <p>B11<br/> Laporan kegiatan yang melampirkan:<br/> a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa:<br/> 1) Surat Permohonan;<br/> 2) NA atau<br/> 3) Penjelasan/Keterangan<br/> 4) dokumen rapat<br/> 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan<br/> 6) Dokumentasi)<br/> 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat<br/> 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan.<br/> b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B12<br/> Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Fasilitasi Raperda yang berasal dari Pemerintah daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>B12<br/> Laporan Kegiatan Fasilitasi Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>  |                  |

| No. | Target Kinerja                                     | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|--|--|---|---|---|------------------|
| 12  | Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum | Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) TA. 2023 | Tersusunnya Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) TA. 2023 | B01:<br>-   | B01:<br>-   | DIV YANKUM       |
|     |  |  |   | B02:<br>Pengecekan kesesuaian data Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 dari BPHN.  | B02:<br>Surat Penyampaian Hasil Monev Administrasi Semester I 2022 dari BPHN.   |                  |
|     |  |  |   | B03:<br>1. Pemetaan Data Hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 untuk dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara faktual;<br>2. Penyampaian jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual ke BPHN. | B03:<br>1. Rapat Penentuan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual (UANG)<br>2. Surat Pemberitahuan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual |                  |
|     |  |  |   | B04:<br>-   | B04:<br>-   |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|--|------------------|
|     |                |                       |                     | B05:<br>Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) Tahap I                                   | B05:<br>1. Surat Perintah Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) Tahap I<br>2. Matrik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) Tahap I     |                  |
|     |                |                       |                     | B06:<br>-  | B06:<br>-  |                  |
|     |                |                       |                     | B07:<br>Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) Tahap II                                  | B07:<br>1. Surat Perintah Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) Tahap II.<br>2. Matrik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) Tahap II. |                  |
|     |                |                       |                     | B08:<br>Penyusunan Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) TA. 2023 | B08:<br>Rapat Finalisasi Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) TA. 2023 (UANG)  |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B09<br>Penyampaian Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) TA. 2023. | B09:<br>Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ( <i>existing</i> ) TA.2023<br>Catatan:<br>Laporan sesuai TNDE |                  |
|     |                |                       |                     | B10:<br>-   | B10:<br>-   |                  |
|     |                |                       |                     | B11:<br>-   | B11:<br>-   |                  |
|     |                |                       |                     | B12:<br>-   | B12:<br>-   |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|---|--|--|---|--|------------------|
| 13  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum melalui Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum | 70% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum | B06:<br>20% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum                        | B06:<br>Laporan Pelaksanaan Monev, paling sedikit memuat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu dan tempat pelaksanaan</li> <li>• Pelaksana Monev</li> <li>• Data PBH yang dilakukan Monev</li> <li>• Data Penerima Bantuan Hukum yang di Monev dari aplikasi Sidbankum (nama dan nomor permohonan)</li> <li>• Hasil Temuan</li> </ul> Catatan:<br>Laporan sesuai TNDE | DIV YANKUM       |
|     |   |  |  | B09:<br>40% (B06:20% + B09:20%)<br>Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum | B09:<br>Laporan Pelaksanaan Monev, paling sedikit memuat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu dan tempat pelaksanaan</li> <li>• Pelaksana Monev</li> <li>• Data PBH yang dilakukan Monev</li> <li>• Data Penerima Bantuan Hukum yang di Monev dari aplikasi Sidbankum (nama dan nomor permohonan)</li> <li>• Hasil Temuan</li> </ul> Catatan:<br>Laporan sesuai TNDE |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|---|--|---|---|---|------------------|
|     |   |  |   | B12:<br>70% (B09:40% + B12:30%)<br>Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum             | B12:<br>Laporan Pelaksanaan Monev, paling sedikit memuat:<br>• Waktu dan tempat pelaksanaan<br>• Pelaksana Monev<br>• Data PBH yang dilakukan Monev<br>• Data Penerima Bantuan Hukum yang di Monev dari aplikasi Sidbankum (nama dan nomor permohonan)<br>• Hasil Temuan<br><br>Catatan:<br>Laporan sesuai TNDE |                  |
| 14  | Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah | Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum | 80% rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah | B03:<br>1. Pembentukan Tim<br>2. Penyusunan Proposal<br>3. Presentasi Proposal<br>4. Evaluasi atas implementasi model intervensi Tahun 2022 | B03:<br>1. SK TIM<br>2. Proposal<br>3. Laporan Kegiatan Presentasi Proposal (bahan presentasi, undangan, absensi, notula rapat, dan dokumentasi)<br>4. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi tahun 2022   | DIV YANKUM       |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan            | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|----------------------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                | dan Hak Asasi Manusia di wilayah |                     | <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan Data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I)</li> <li>2. Pelaksanaan verifikasi lapangan</li> <li>3. Pengolahan data hasil verifikasi lapangan</li> <li>4. Penyampaian laporan hasil verifikasi lapangan ke UPT (termasuk model intervensi)</li> <li>5. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I)</li> </ol> | <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I)</li> <li>2. Laporan verifikasi data lapangan</li> <li>3. Laporan Pengolahan data hasil verifikasi lapangan</li> <li>4. Surat penyampaian dan Bukti capture penyampaian laporan hasil verifikasi lapangan ke UPT (termasuk model intervensi)</li> <li>5. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I)</li> </ol> |                  |
|     |                |                                  |                     | <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan Data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April – Juni 2023 (Triwulan II)</li> <li>2. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan April – Juni 2023 (Triwulan II)</li> </ol>  | <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pengolahan Data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April – Juni 2023 (Triwulan II)</li> <li>2. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi periode April – Juni 2023 (Triwulan II)</li> </ol>   |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|---|--|--|--|------------------|
|     |  |   |  | <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli – September 2023 (Triwulan III)</li> <li>2. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Juli – September 2023 (Triwulan III)</li> <li>3. Pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober-November 2023 (Triwulan IV)</li> </ol> | <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli – September 2023 (Triwulan III)</li> <li>2. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Juli – September 2023 (Triwulan III)</li> <li>3. Laporan Pengolahan data hasil Survei <i>Online</i> IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober-Desember 2023 (Triwulan IV)</li> </ol> |                  |
| 15  | Memastikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | 1. Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui | 1. Tersosialisasikan tugas, fungsi, dan aplikasi PPNS kepada seluruh PPNS di | B01:<br>Koordinasi terkait sosialisasi tugas fungsi dan aplikasi PPNS di wilayah   | B01:<br>Laporan kegiatan koordinasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)   | DIV YANKUM       |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan               | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-------------------------------------|---|---|--|------------------|
|     |                | aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham | wilayah;<br>2. Terintegrasinya data seluruh PPNS di Aplikasi PPNS;<br>3. Terlaksananya pelaporan seluruh kegiatan PPNS pada aplikasi (per triwulan / semester). | B02:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | B02:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 80% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi) |                  |
|     |                |                                     |   | B03:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | B03:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 90% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi) |                  |
|     |                |                                     |   | B04:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | B04:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 95% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi) |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B05:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | B05:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi) |                  |
|     |                |                       |                     | B06:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS | B06:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi) |                  |
|     |                |                       |                     | B07:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS | B07:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi) |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B08:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS | B08:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi) |                  |
|     |                |                       |                     | B09:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS | B09:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi) |                  |
|     |                |                       |                     | B10:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS | B10:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi) |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|---|--|--|--|------------------|
|     |                |   |  | B11:<br>Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS                    | B11:<br>Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)                    |                  |
|     |                |   |  | B12:<br>Evaluasi pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023 melalui aplikasi PPNS           | B12:<br>Laporan Evaluasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)   |                  |
|     |                | 2. Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan) | Terlaksananya kegiatan penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah:<br>a. Kewarganegaraan;<br>b. Pewarganegaraan;<br>c. Apostille; dan<br>d. Perseroan Perorangan untuk 10% dari jumlah UKM di wilayah masing- masing. | B01-B02:<br>1. Persiapan dan koordinasi awal penyebaran informasi layanan AHU di Wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan); | B01-B02:<br>Laporan persiapan dan koordinasi awal (Lampiran: surat undangan, daftar hadir/surat tugas, notula, dokumentasi foto) dan Matriks data pengguna layanan (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan) per Januari 2022 | DIV YANKUM       |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B03-B05:<br>Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan  | B03-B05:<br>Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Kewarganegaraan dan pewarganegaraan (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)                                 |                  |
|     |                |                       |                     | B06-B08:<br>Penyebaran informasi layanan Apostille  | B06-B08:<br>Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Apostille (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)   |                  |
|     |                |                       |                     | B09-B11:<br>Penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan   | B09-B11:<br>Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)  |                  |
|     |                |                       |                     | B12:<br>Evaluasi pelaksanaan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan) | B12:<br>1. Laporan Evaluasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi);<br>2. Matriks data pengguna layanan (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan) per Desember 2023 |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|---|--|---|--|------------------|
| 16  | Penerapan PMPJ dan Pengawasan Audit Kepatuhan Terhadap Notaris | Pengisian Form CDD oleh Pengguna Jasa, Penilaian Mitigasi Risiko oleh Notaris dan Penilaian Notaris berisiko oleh LPP | Penerapan PMPJ dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML oleh Notaris | B01:<br>Pembentukan SK Tim  | B01:<br>SK TIM   | DIV YANKUM       |
|     |  |   |  | B02:<br>Penyusunan jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU) | B02:<br>Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko.  |                  |
|     |  |   |  | B03:<br>Internalisasi SRA, Pengisian CDD Mitigasi penilaian risiko pengguna jasa oleh Notaris & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)                  | B03:<br>Laporan kegiatan (lampiran: surat undangan, daftar hadir peserta, notula, tabel pemetaan (presentase jumlah Notaris dengan jumlah yang sudah mengisi kuesioner PMPJ Tahun 2022), dokumentasi foto) |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|--|------------------|
|     |                |                       |                     | B06-B11:<br>Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022 | B06-B11:<br>1. Surat Pengantar Audit Kepatuhan (Lampiran IV - Panduan Teknis Audit Kepatuhan);<br>2. Daftar Hadir Audit Kepatuhan;<br>3. Notula Kegiatan Audit Kepatuhan;<br>4. Dokumentasi Foto Kegiatan Audit Kepatuhan;<br>5. Laporan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Audit Kepatuhan;<br>6. Capture penyampaian seluruh data dukung via Sumaker yang terlampir dalam panduan teknis hingga tembusan laporan hasil audit kepatuhan kepada Subbagian Tata Usaha Direktorat Perdata cq. Subdit Notariat. |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan             | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|--|--|---------------------------------|---|---|------------------|
|     |  |  |                                 | <p>B12:<br/>Evaluasi atas Audit Pengawas Kepatuhan Penerapan PMPJ oleh Kanwil bersama Majelis Pengawas Notaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Wilayah wajib melaksanakan rapat internal untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dengan evaluasi sekurang- kurangnya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian dari pelaksanaan pengawasan;</li> <li>- Tantangan / kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta solusi yang diambil;</li> <li>- Rencana tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan tahun 2023.</li> </ul> </li> </ul> | <p>B12:<br/>Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) tabel data pengisian kuesioner (presentase jumlah Notaris dengan jumlah yang sudah mengisi kuesioner PMPJ Tahun 2022 &amp; Tahun 2023) dan tabel data Audit pengawas kepatuhan Tahun 2022 &amp; Tahun 2023)</p> |                  |
| 17  | Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris | Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil & Pengwil. | Adanya Data Notaris yang Akurat | <p>B01:<br/>Pembentukan Tim</p> <p>B02:<br/>Pemetaan jumlah Notaris sesuai data base</p>  | <p>B01:<br/>SK Tim</p> <p>B02:<br/>Data Notaris di Wilayah</p>  | DIV YANKUM       |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B03:<br/>Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil &amp; Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia &amp; pensiun dengan target 25% dari jumlah Notaris di wilayah.</p> | <p>B03:<br/>- Hasil pengecekan data : 25% dari jumlah Notaris di wilayah.<br/>- Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia &amp; sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya.<br/>- Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto &amp; data Notaris)</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B06:<br/>Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil &amp; Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia &amp; pensiun dengan target 50% dari jumlah Notaris di wilayah.</p> | <p>B06:<br/>- Hasil pengecekan data : 50% dari jumlah Notaris di wilayah.<br/>- Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia &amp; sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya.<br/>- Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto &amp; data Notaris)</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B09:<br/>Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil &amp; Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia &amp; pensiun dengan target 75% dari jumlah Notaris di wilayah.</p>  | <p>B09:<br/>- Hasil pengecekan data : 75% dari jumlah Notaris di wilayah.<br/>- Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia &amp; sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya.<br/>- Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto &amp; data Notaris)</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B11:<br/>Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil &amp; Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia &amp; pensiun dengan target 100% dari jumlah Notaris di wilayah.</p> | <p>B11:<br/>- Hasil pengecekan data : 100% dari jumlah Notaris di wilayah.<br/>- Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia &amp; sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya.<br/>Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto &amp; data Notaris)</p>  |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|---|--|---|--|---|------------------|
|     |   |  |   | B12:<br>Evaluasi Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris  | B12:<br>Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, data sebelum dan sesudah dilakukan pengecekan & identifikasi status Notaris)   |                  |
| 18  | Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi | Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi | Diperolehnya alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi | <p>B01-B02:<br/>Persiapan dan koordinasi dengan instansi pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan data</p> <p>B03-B04:<br/>Sosialisasi kepada partai politik tingkat provinsi terkait pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</p> <p>B05-B08:<br/>Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</p> <p>B09-B11:<br/>Pengkajian dan pendokumentasian data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</p> | <p>B01-B02:<br/>Laporan (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)</p> <p>B03-B04:<br/>Laporan (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)</p> <p>B05-B08:<br/>Laporan pengumpulan data (Laporan kegiatan, foto)</p> <p>B09-B11:<br/>Laporan pengkajian dan pendokumentasian data (laporan kegiatan, foto)</p> | DIV YANKUM       |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|--|---|--|--|------------------|
|     |  |  |   | B12:<br>Evaluasi pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik        | B12:<br>Laporan hasil evaluasi (Laporan kegiatan, foto)  |                  |
| 19  | Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia | Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah. | Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah. | B01-B03:<br>Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU | B01-B03:<br>Laporan koordinasi persiapan tarja (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi) | DIV YANKUM       |
|     |  |  |   | B04-B08:<br>Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas                           | B04-B08:<br>Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas di wilayah                                     |                  |
|     |  |  |   | B09-B11:<br>Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas                           | B09-B11:<br>Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas di wilayah                                     |                  |
|     |  |  |   | B12:<br>Evaluasi pelaksanaan pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas          | B12:<br>Laporan hasil Evaluasi   |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan                                | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|---|--|--|--|---|------------------|
| 20  | Mendorong pertumbuhan permohonan merek <i>One Village One Brand</i> dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk <i>Mobile IP Clinic</i> | inventarisasi potensi pendaftaran merek di desa-desa | Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek | B01 :<br>Kanwil mengikuti koordinasi konsep dan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis <i>One Village One Brand</i>  | B01 :<br>laporan keikutsertaan koordinasi dan sosialisasi   | DIV YANKUM       |
|     |   |  |  | B02:<br>Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, terkait:<br>1. Pemetaan atau inventarisasi potensi <i>One Village One Brand</i> dan IG<br>2. Persiapan pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i> terkait sarana prasarana layanan HKI di wilayah | B02:<br>laporan koordinasi potensi <i>One Village One Brand</i> atau laporan koordinasi rencana pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i> |                  |
|     |   |  |  | B03:<br>1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan<br>2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri   | B03:<br>Laporan   |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung     | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|-----------------|------------------|
|     |                |                       |                     | B04:<br>1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan)<br>2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri  | B04:<br>Laporan |                  |
|     |                |                       |                     | B05:<br>1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan)<br>2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri  | B05:<br>Laporan |                  |
|     |                |                       |                     | B06:<br>1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan)<br>2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri  | B06:<br>Laporan |                  |
|     |                |                       |                     | B07 :<br>1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan)<br>2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri | B07:<br>Laporan |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|---|--|---|--|------------------|
|     |  |   |  | B08:<br>1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan)<br>2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri | B08:<br>Laporan  |                  |
|     |  |   |  | B09:<br>1. Pelaksanaan layanan HKI melalui <i>Mobile IP Clinic</i> di Wilayah (persiapan, pelaksanaan)<br>2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri | B09:<br>Laporan  |                  |
|     |  |   |  | B10:<br>Inventarisasi <i>One Village One Brand</i> dan IG   | B10:<br>laporan hasil inventarisasi <i>One Village One Brand</i> dan IG              |                  |
|     |  |   |  | B11:<br>1. Evaluasi hasil inventarisasi <i>One Village One Brand</i> dan IG<br>2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i>  | B11:<br>laporan evaluasi hasil inventarisasi dan pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i> |                  |
|     |  |   |  | B12:<br>-   | B12:<br>-  |                  |
| 21  | Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK | Kantor Wilayah menjalin kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan layanan KI dan peningkatan permohonan KI melalui implementasi MoU/PKS | Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU/PKS Kantor Wilayah dengan Stakeholder wilayah | B01 :<br>- Inventarisasi dan Evaluasi MoU yang sudah dilakukan oleh Kanwil.<br>- Tindak lanjut dan penyusunan MoU/ PKS kanwil dengan stakeholder tahun 2023."                                     | B01 :<br>Laporan Evaluasi 2022   | DIV YANKUM       |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan             | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung                                    | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|------------------|
|     |                | Kanwil dengan stakeholder wilayah |                     | <p>B02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanwil mengikuti koordinasi <i>Mobile IP Clinic</i> yang dilaksanakan oleh DJKI</li> <li>- Kanwil menyusun rencana pelaksanaan <i>Mobile IP Clinic</i> dengan titik berat merek (dalam rangka tahun merek).</li> <li>- Kanwil Koordinasi dengan MIPG untuk penyempurnaan Dokumen Deskripsi permohonan Indikasi Geografis yang sudah diajukan sebelumnya."</li> </ul> | <p>B02:<br/>Laporan pelaksanaan kegiatan."</p> |                  |
|     |                |                                   |                     | <p>B03:<br/>Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab/instansi terkait layanan KI melalui 2 mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP Clinic (mall pelayanan publik, layanan sentra KI, dll) - bagi wilayah yang telah memiliki layanan KI/IP Clinic di MPP</li> <li>2. <i>Mobile IP Clinic</i> - bagi wilayah yang belum memiliki layanan KI di MPP.</li> </ol>                           | <p>B03: Dokumen Laporan koordinasi</p>         |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung                          | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|     |                |                       |                     | B04:<br>Inventarisasi layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya :<br>1. IP Clinic<br>2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC/ 1 tahun) | B04:<br>Dokumen Laporan implementasi |                  |
|     |                |                       |                     | B05:<br>Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya :<br>1. IP Clinic<br>2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)            | B05:<br>Dokumen Laporan implementasi |                  |
|     |                |                       |                     | B06 :<br>Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya :<br>1. IP Clinic<br>2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)           | B06:<br>Dokumen Laporan implementasi |                  |
|     |                |                       |                     | B07:<br>Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya :<br>1. IP Clinic<br>2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)            | B07:<br>Dokumen Laporan implementasi |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung                            | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|--|------------------|
|     |                |                       |                     | B08 :<br>Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya :<br>1. IP Clinic<br>2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC) | B08:<br>Dokumen Laporan implementasi   |                  |
|     |                |                       |                     | B09:<br>Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya :<br>1. IP Clinic<br>2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)  | B09:<br>Dokumen Laporan implementasi   |                  |
|     |                |                       |                     | B10:<br>Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya :<br>1. IP Clinic<br>2. <i>Mobile IP Clinic</i> (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)  | B10:<br>Dokumen Laporan implementasi   |                  |
|     |                |                       |                     | "B11:<br>-"   | "B11:<br>-"                            |                  |
|     |                |                       |                     | B12:<br>Pelaksanaan evaluasi MIC serta rencana kerja pelaksanaan implementasidi tahun 2024  | B12: Dokumen Laporan dan evaluasi 2023 |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan                                 | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|---|--|---|--|--|------------------|
| 22  | Persiapan Pencanaan Kawasan Karya Cipta 2024 Dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku | Kantor Wilayah bersama dengan stakeholder Melaksanakan mengusulkan inventarisasi kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan pedoman yang diberikan | Kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan kriteria | B01 :<br>-   | B01 :<br>-   | DIV YANKUM       |
|     |   |  |   | B02:<br>Mengikuti koordiasi persiapan Pemetaan Calon kawasan karya cipta dari DJKI                   | B02:<br>Laporan mengikuti kegiatan dan dokumentasi       |                  |
|     |   |  |   | B03 :<br>1. Koordinsi dengan stakeholder<br>2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI | B03:<br>Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC |                  |
|     |   |  |   | B04 :<br>-   | B04 :<br>-   |                  |
|     |   |  |   | B05 :<br>-   | B05 :<br>-   |                  |
|     |   |  |   | B06:<br>1. Koordinsi dengan stakeholder<br>2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI  | B06: Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC    |                  |
|     |   |  |   | B07 :<br>-   | B07 :<br>-   |                  |
|     |   |  |   | B08 :<br>-   | B08 :<br>-   |                  |
|     |   |  |   | B09:<br>1. Koordinsi dengan stakeholder<br>2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI  | B09:<br>Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC |                  |
|     |   |  |   | B10 :<br>-   | B10 :<br>-   |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|--|--|---|--|------------------|
|     |  |  |  | B11:<br>Verifikasi Data Kandidat KKC  | B11:<br>Hasil verifikasi kandidat KKC oleh DJKI dan Kanwil             |                  |
|     |  |  |  | B12:<br>Penentuan kandidat kawasan karya cipta 2024   | B12:<br>Laporan usulan Kandidat KKC                                    |                  |
| 23  | Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang | Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten | Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten | B01:<br>Memetakan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang  | B01:<br>Daftar Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang                    | DIV YANKUM       |
|     |  |  |  | B02:<br>-   | B02:<br>-  |                  |
|     |  |  |  | B03:<br>-   | B03:<br>-  |                  |
|     |  |  |  | B04:<br>Koordinasi dengan Direktorat Paten, DTLST dan RD  | B04:<br>Laporan hasil koordinasi dengan Direktorat Paten, DTLST dan RD |                  |
|     |  |  |  | B05:<br>-   | B05:<br>-  |                  |
|     |  |  |  | B06:<br>Pelaksanaan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang | B06:<br>Laporan kegiatan   |                  |
|     |  |  |  | B07:<br>Evaluasi kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang    | B07:<br>Laporan hasil evaluasi kegiatan                                |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|--|---|--|--|------------------|
|     |  |  |   | B08:<br>-  | B08:<br>-  |                  |
|     |  |  |   | B09:<br>-  | B09:<br>-  |                  |
|     |  |  |   | B10:<br>-  | B10:<br>-  |                  |
|     |  |  |   | B11:<br>-  | B11:<br>-  |                  |
|     |  |  |   | B12:<br>-  | B12:<br>-  |                  |
| 24  | Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional | Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI) | Terlaksananya sertifikasi pusat belanja dan monev sertifikasi pusat belanja berbasis KI | B01:<br>-  | B01:<br>-  | DIV YANKUM       |
|     |  |  |   | B02:<br>-  | B02:<br>-  |                  |
|     |  |  |   | B03:<br>Pelaksanaan koordinasi dengan Direktorat Penyidikan atas rencana tindak lanjut sertifikasi pusat belanja tahun 2022 serta tahapan rencana kerja di tahun 2023 dengan ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional | B03:<br>Laporan mengikuti kegiatan dan dokumentasi |                  |
|     |  |  |   | B04:<br>-  | B04:<br>-  |                  |
|     |  |  |   | B05:<br>-  | B05:<br>-  |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B06:<br/>Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional</p>  | <p>B06:<br/>Laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B07:<br/>- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional<br/>- Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan</p> | <p>B07:<br/>laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B08:<br/>- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional<br/>- Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan</p> | <p>B08:<br/>laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B09:<br>- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional<br>- Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | B09:<br>laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI |                  |
|     |                |                       |                     | B10:<br>- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional<br>- Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | B10:<br>laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI |                  |
|     |                |                       |                     | B11:<br>- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional<br>- Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | B11:<br>laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|---|--|--|--|--|------------------|
|     |   |  |  | B12:<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional dan rencana kerja KI 2024 | B12:<br>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja            |                  |
| 25  | Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia | Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM | 45 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia | B01:<br>Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait  | B01:<br>Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM Daerah | DIV YANKUM       |
|     |   |  |  | B02:<br>Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait                            | B02:<br>Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM 2022                       |                  |
|     |   |  |  | B03:<br>Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait  | B03:<br>Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM Daerah |                  |
|     |   |  |  | B04:<br>Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B04  | B04:<br>Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kab/Kota        |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B05:<br>Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B04                                    | B05:<br>Daftar Pelaporan Aksi HAM Daerah  |                  |
|     |                |                       |                     | B06:<br>Koordinasi dan konsultasi persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08                  | B06:<br>Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08 |                  |
|     |                |                       |                     | B07:<br>Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | B07:<br>Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM B04 tahun 2022                              |                  |
|     |                |                       |                     | B08:<br>Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B08   | B08:<br>Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kab/Kota                         |                  |
|     |                |                       |                     | B09:<br>Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B08                                    | B09:<br>Daftar Pelaporan Aksi HAM Daerah B08  |                  |
|     |                |                       |                     | B10:<br>Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | B10:<br>Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM B08 tahun 2022                              |                  |

| No. | Target Kinerja                                  | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|---|--|--|--|---|------------------|
|     |   |  |  | B11:<br>Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B12  | B11:<br>Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B12 Daerah Provinsi, Kab/Kota   |                  |
|     |   |  |  | B12:<br>Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B12   | B12:<br>Daftar Pelaporan Aksi HAM Daerah B12  |                  |
| 26  | Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM | Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM | 25% instansi pemerintah yang mendapatkan kriteria Daerah Kab/Kota Peduli HAM | B01 :<br>Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah | B01 :<br>Surat Notifikasi pelaksanaan Permenkumham No. 22 tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah daerah | DIV YANKUM       |
|     |   |  |  | B02 :<br>Rapat persiapan penginputan laporan KKP HAM   | B02 :<br>Dokumentasi dan notulensi  |                  |
|     |   |  |  | B03:<br>Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah  | B03 :<br>Dokumen Formulir Pengisian Pelaporan KKP HAM   |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|--|------------------|
|     |                |                       |                     | B04 :<br>Mengunggah dokumen Pelaporan KKP HAM Pemda masing-masing Wilayah ke website Aplikasi (kkpham.kemenkumam.go.id) | B04 :<br>Berita Acara pengisian ke aplikasi (kkpham.kemenkumham.go.id)   |                  |
|     |                |                       |                     | B05 :<br>Menginventarisir hasil pelaporan KKP HAM   | B05 :<br>Dokumen Rekap Pemda yang melaporkan dan tidak melaporkan KKP HAM  |                  |
|     |                |                       |                     | B06 :<br>Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM        | B06 :<br>Laporan hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM |                  |
|     |                |                       |                     | B07 :<br>Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka evaluasi pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM                  | B07 :<br>Dokumentasi dan notulensi   |                  |
|     |                |                       |                     | B08 :<br>Penginputan data indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM   | B08 :<br>Berita acara hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota Peduli HAM  |                  |
|     |                |                       |                     | B09 – B12:<br>-   | B09 – B12:<br>-  |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 27  | Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM | Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 50% Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | B01 :<br>Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya     | B01 :<br>Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya | DIV YANKUM       |
|     |  |  |  | B02 :<br>Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya | B02 :<br>Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya    |                  |
|     |  |  |  | B03:<br>Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Tahun sebelumnya  | B03 :<br>Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya    |                  |
|     |  |  |  | B04 :<br>Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I   | B04 :<br>Laporan Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM pada Triwulan I   |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B05 :<br>Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I  | B05 :<br>Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan I             |                  |
|     |                |                       |                     | B06 :<br>Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I  | B06 :<br>Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan I             |                  |
|     |                |                       |                     | B07 :<br>Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I       | B07 :<br>Laporan Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM Semester I   |                  |
|     |                |                       |                     | B08 :<br>Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I | B08 :<br>Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Semester I |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|--|------------------|
|     |                |                       |                     | B09 :<br>Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I         | B09 :<br>Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Semester I                |                  |
|     |                |                       |                     | B10 :<br>Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Januari- September 2023 | B10 :<br>Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Januari-September 2023 |                  |
|     |                |                       |                     | B11 :<br>Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III       | B11 :<br>Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan III              |                  |

| No.                          | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan                                     | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|------------------------------|--|---|---|--|--|------------------|
|                              |  |   |   | B.12 :<br>1. Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III;<br>2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada tahun berjalan | B.12 :<br>1. Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan III;<br>2. Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun berjalan |                  |
| <b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b> |  |   |   |  |  |                  |
| 28                           | Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Masyarakat Di Bidang Pelayanan Tahanan | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat dibidang Pelayanan Tahanan | Menurunnya angka Overstaying Tahanan di Lapas dan Rutan | B.01<br>Membuat SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di Ypt Lapas/Rutan Wilayah  | B01<br>SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di Ypt Lapas/Rutan Wilayah   | DIV PAS          |
|                              |  |   |   | B02<br>Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan   | B02<br>Laporan Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan   |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B03<br>Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan | B03<br>Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan |                  |
|     |                |                       |                     | B04<br>Melaksanakan Dilkumjakpol terkait upaya penanganan overstaying tahanan   | B04<br>Laporan Pelaksanaan Dilkumjakpol terkait upaya penanganan overstaying tahanan  |                  |
|     |                |                       |                     | B05<br>Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan  | B05<br>Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan |                  |
|     |                |                       |                     | B06<br>Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan | B06<br>Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B07<br>Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan | B07<br>Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan |                  |
|     |                |                       |                     | B08<br>Sosialisasi Penanganan Overstayign Tahanan   | B08<br>Laporan Sosialisasi Penanganan Overstayign Tahanan   |                  |
|     |                |                       |                     | B09<br>Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan | B09<br>Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan |                  |
|     |                |                       |                     | B10<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi  | B10<br>Laporan Monitoring dan Evaluasi  |                  |
|     |                |                       |                     | B11<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi  | B11<br>Laporan Monitoring dan Evaluasi  |                  |
|     |                |                       |                     | B12<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi  | B12<br>Laporan Monitoring dan Evaluasi  |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|---|---|---|--|---|------------------|
| 29  | Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan dibidang Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan | Terselenggara Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan | B01<br>Pembentukan Tim pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan  | B01<br>SK Tim   | DIV PAS          |
|     |   |   |   | B02<br>Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian  | B02<br>Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian |                  |
|     |   |   |   | B03<br>Memfasilitasi perjanjian kerjasama antara Pihak ketiga yang terakreditasi maupun terverifikasi dengan Unit Pelaksana Teknis Rutan/Lapas dalam pelaksanaan Pelayanan tahanan | B03<br>Perjanjian Kerjasama / MOU   |                  |
|     |   |   |   | B04<br>Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Tahanan Miskin  | B04<br>Laporan Jumlah Tahanan miskin yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) di Rutan                 |                  |
|     |   |   |   | B05<br>Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan  | B05<br>Laporan Supervisi  |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B06<br>Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian | B06<br>Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian |                  |
|     |                |                       |                     | B07<br>Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian | B07<br>Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian |                  |
|     |                |                       |                     | B08<br>Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Tahanan Miskin                               | B08<br>Laporan Jumlah Tahanan miskin yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) di Rutan                 |                  |
|     |                |                       |                     | B09<br>Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan   | B09<br>Laporan Supervisi  |                  |
|     |                |                       |                     | B10<br>Monitoring dan Evaluasi  | B10<br>Laporan monitoring dan evaluasi  |                  |
|     |                |                       |                     | B11<br>Monitoring dan Evaluasi  | B11<br>Laporan monitoring dan evaluasi  |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|--|--|--|--|---|------------------|
|     |  |  |  | B12<br>Monitoring dan Evaluasi   | B12<br>Laporan monitoring dan evaluasi                        |                  |
| 30  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakatan di bidang pengelolaan basan baran | Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar | Pengunaan SDP dalam Tatakelola administrasi basan baran yang optimal | B01<br>Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM | B01<br>Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran | DIV PAS          |
|     |  |  |  | B02<br>Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM | B02<br>Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran |                  |
|     |  |  |  | B03<br>Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM | B03<br>Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran |                  |
|     |  |  |  | B04<br>Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM | B04<br>Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran |                  |
|     |  |  |  | B05<br>Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM | B05<br>Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B06<br>Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM | B06<br>Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran |                  |
|     |                |                       |                     | B07<br>Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)  | B07<br>Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)   |                  |
|     |                |                       |                     | B08<br>Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)  | B08<br>Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)   |                  |
|     |                |                       |                     | B09<br>Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)  | B09<br>Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)   |                  |
|     |                |                       |                     | B10<br>Monitoring dan Evaluasi   | B10<br>Laporan Monitoring dan Evaluasi                        |                  |
|     |                |                       |                     | B11<br>Monitoring dan Evaluasi   | B11<br>Laporan Monitoring dan Evaluasi                        |                  |
|     |                |                       |                     | B12<br>Monitoring dan Evaluasi   | B12<br>Laporan Monitoring dan Evaluasi                        |                  |

| No. | Target Kinerja                                  | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|---|--|--|--|--|------------------|
| 31  | Penyelenggaraan layanan rehabilitasi masyarakat | Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi masyarakat. | Terselenggaranya layanan rehabilitasi bagi tahanan, narapidana, dan klien sesuai standar rehabilitasi masyarakat | B.01:<br>Penyampaian SK Direktur Jenderal Masyarakat tentang Penetapan UPT Masyarakat Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023 | B.01:<br>Laporan penyampaian SK Direktur ke wilayah. | DIV PAS          |
|     |   |  |  | B.02:<br>Koordinasi Kesiapan UPT Masyarakat Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023   | B.02:<br>Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi |                  |
|     |   |  |  | B.03:<br>Perencanaan Pelaksanaan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat ke UPT Masyarakat                                   | B.03:<br>Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Persiapan  |                  |
|     |   |  |  | B.04:<br>Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023  | B.04:<br>Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring  |                  |
|     |   |  |  | B.05:<br>Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023  | B.05:<br>Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring  |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B.06:<br>Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023                   | B.06:<br>Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring   |                  |
|     |                |                       |                     | B.07:<br>Monitoring UPT Pemasarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan | B.07:<br>Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring  |                  |
|     |                |                       |                     | B.08:<br>Monitoring UPT Pemasarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan | B.08:<br>Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring  |                  |
|     |                |                       |                     | B.09:<br>Monitoring UPT Pemasarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan | B.09:<br>Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring  |                  |
|     |                |                       |                     | B.10:<br>Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B.01-06)                     | B.10:<br>Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan                      |                  |
|     |                |                       |                     | B.11:<br>Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B.07-09)                     | B.11:<br>Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Juli- September 2023 |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan                            | Ukuran Keberhasilan                                | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|---|--|--|--|--|------------------|
|     |   |  |  | B.12:<br>Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat (B.10-12)  | B.12:<br>Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Oktober-Desember 2023          |                  |
| 32  | Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan masyarakat melalui pertukaran data SPPT TI | Terlaksananya SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas | Seluruh Lapas/Rutan/Bapas telah menerapkan SPPT TI | B.01:<br>1. Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023<br>2. Penetapan UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023 | B.01:<br>1. SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023<br>2. SK UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023 | DIV PAS          |
|     |   |  |  | B.02:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan  | B.02:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan  |                  |
|     |   |  |  | B.03:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan  | B.03:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan  |                  |
|     |   |  |  | B.04:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan  | B.04:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan  |                  |
|     |   |  |  | B.05:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan  | B.05:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan  |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B.06:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan | B.06:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan |                  |
|     |                |                       |                     | B.07:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan | B.07:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan |                  |
|     |                |                       |                     | B.08:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan | B.08:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan |                  |
|     |                |                       |                     | B.09:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan | B.09:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan |                  |
|     |                |                       |                     | B.10:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan | B.10:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan |                  |
|     |                |                       |                     | B.11:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan | B.11:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan |                  |
|     |                |                       |                     | B.12:<br>Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan | B.12:<br>Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|--|--|--|---|--|------------------|
| 33  | <i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah <i>Piloting</i> | <i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah <i>Piloting</i> | <i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah <i>Piloting</i> | B.01:<br>Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Masyarakat  | B.01:<br>SK Tim  | DIV PAS          |
|     |  |  |  | B.02:<br>Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi tentang Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Masyarakat                               | B.02:<br>Laporan Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Masyarakat  |                  |
|     |  |  |  | B.03:<br>Asistensi <i>Online</i> Persiapan Rapat Koordinasi Tentang <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif  | B.03:<br>Laporan Pelaksanaan Asistensi <i>Online</i> Persiapan Rapat Koordinasi Tentang <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa        |                  |
|     |  |  |  | B.04:<br>Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi tentang Peran Masyarakat dalam Penerapan Keadilan Restoratif ke Kepolisian Kejaksaan, dan Pengadilan Setempat | B.04:<br>Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi tentang Peran Masyarakat dalam Penerapan Keadilan Restoratif ke Kepolisian Kejaksaan, dan Pengadilan Setempat |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B.05:<br>Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan | B.05:<br>Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan |                  |
|     |                |                       |                     | B.06:<br>Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan | B.06:<br>Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan |                  |
|     |                |                       |                     | B.07:<br>Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan | B.07:<br>Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan |                  |
|     |                |                       |                     | B.08:<br>Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan | B.08:<br>Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan |                  |
|     |                |                       |                     | B.09:<br>Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan | B.09:<br>Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan |                  |

| No. | Target Kinerja                                      | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|---|--|--|--|---|------------------|
|     |   |  |  | B.10:<br>Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan  | B.10:<br>Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan                                     |                  |
|     |   |  |  | B.11:<br>Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan  | B.11:<br>Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan                                     |                  |
|     |   |  |  | B.12:<br>Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan  | B.12:<br>Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan                                     |                  |
| 34  | Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana | 1. Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi | Jumlah Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan Kemandirian sbb:<br>a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun | B.01:<br>Koordinasi dengan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan. Koordinasi dengan pihak ketiga yang diproyeksikan menjadi mitra lapas. | B.01:<br>Laporan koordinasi dengan Kanwil terkait pemetaan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan. | DIV PAS          |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|--|--|---|------------------|
|     |                |                       | <p>2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra.</p> <p>b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.</p> | <p>B.02: Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas terkait pembinaan kemandirian sbb:</p> <p>a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra.</p> <p>b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.</p> | <p>B.02: Laporan Rekapitulasi Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas</p>   |                  |
|     |                |                       |  | <p>B.03: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>  | <p>B.03: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p> |                  |
|     |                |                       |  | <p>B.04: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>   | <p>B.04: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p> |                  |
|     |                |                       |  | <p>B.05: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>  | <p>B.05: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B.06:<br>Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra. | B.06:<br>Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra  |                  |
|     |                |                       |                     | B.07:<br>Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.   | B.07:<br>Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra            |                  |
|     |                |                       |                     | B.08:<br>Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra. | B.08:<br>Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra. |                  |
|     |                |                       |                     | B.09:<br>Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra. | B.09:<br>Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra. |                  |
|     |                |                       |                     | B.10:<br>Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra. | B.10:<br>Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra  |                  |
|     |                |                       |                     | B.11:<br>Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra. | B.11:<br>Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra. |                  |
|     |                |                       |                     | B.12:<br>Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra    | B.12:<br>Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.           |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|---|--|--|--|------------------|
|     |                | 2. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian. | Narapidana yang dinilai dan memperoleh nilai sangat baik dalam pembinaan kepribadian dengan instrumen SPPN sebanyak 70%. | <p>B.01:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian pembinaan narapidana.</li> <li>2. Tindak lanjut Surat Edaran tentang Target Kinerja Pelayanan pembinaan narapidana tahun 2023</li> </ol> | <p>B.01:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan penilaian pembinaan narapidana.</li> <li>2. Laporan hasil penilaian pada bulan Desember.</li> <li>3. Laporan hasil tindak lanjut SE tentang Target Kinerja Pelayanan Pembinaan Narapidana tahun 2023.</li> </ol> | DIV PAS          |
|     |                |   |  | <p>B.02:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari.</li> <li>2. Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023.</li> </ol>                    | <p>B.02:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari.</li> <li>2. Laporan hasil Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023.</li> </ol>   |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|--|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B.03:</p> <p>1.55% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.55% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.55% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.55% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari.</p> | <p>B.03:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Februari. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B.04 :</p> <p>1.60% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.60% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.60% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.60% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret.</p>   | <p>B.04:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Maret. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>       |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|--|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B.05:</p> <p>1.65% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.65% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.65% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.65% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan April.</p> | <p>B.05:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan April.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan April. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B.06:</p> <p>1.70% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.70% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.70% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.70% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p>   | <p>B.06:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Mei. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>     |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|--|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B.07:</p> <p>1.75% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.75% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.75% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.75% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p> | <p>B.07:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juni. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B.08:</p> <p>1.80% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.80% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.80% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.80% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p> | <p>B.08:</p> <p>1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p> <p>2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juli. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>   |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|--|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B.09:</p> <p>1.85% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.85% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.85% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.85% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p>   | <p>B.09:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Agustus. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>     |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B.10:</p> <p>1.90% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.90% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.90% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.90% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p> | <p>B.10:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan September. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|--|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B.11:<br/>           1.95% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.<br/>           2.95% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.<br/>           3.95% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.<br/>           4.95% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.<br/>           5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober.</p> | <p>B.11:<br/>           1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober.<br/>           2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Oktober. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>   |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B.12:<br/>           1.100% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.<br/>           2.100% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.100% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.<br/>           4.100% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.<br/>           5. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan November.</p>          | <p>B.12:<br/>           1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan November.<br/>           2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan November. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|---|---|--|---|--|------------------|
| 35  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban | Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini | Melakukan langkah-langkah deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA | B01<br>1. Sosialisasi dan internalisasi target kinerja pusat ke seluruh UPT<br>2. Pembentukan UIP pada setiap UPT<br>3. Jumlah Petugas yang belum dan yang sudah mendapatkan pelatihan di UPT<br>4. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib<br>5. Sosialisasi konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan | B01<br>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi target kinerja<br>2. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia<br>3. Rekap dari kanwil nama, nip, jabatan, nomor HP petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan dari UPT<br>4. laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini<br>5. Laporan pelaksanaan sosialisasi konsolidasi | DIV PAS          |
|     |   |   |  | B02<br>1. Pembentukan UIP pada setiap UPT<br>2. Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah<br>3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan  | B02<br>1. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia<br>2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap UPT<br>3. Laporan hasil konsolidasi   |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B03</p> <p>1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>2.Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Barat</p> <p>3. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p> | <p>B03</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP</p> <p>3. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>4.Laporan hasil konsolidasi</p> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B04</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuis kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Tengah</li> <li>2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</li> <li>3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</li> </ol> | <p>B04</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuis anggota UIP</li> <li>2. Laporan kegiatan Intelijen</li> <li>3. Laporan hasil konsolidasi</li> </ol> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B05<br>1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Timur<br>2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen<br>3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan | B05<br>1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP<br>2. Laporan kegiatan Intelijen<br>3. Laporan hasil konsolidasi |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian  | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|---|--|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B06<br/>           1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban<br/>           2.Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen<br/>           3.Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib<br/>           4.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p> | <p>B06<br/>           1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencan a aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan<br/>           2. Laporan kegiatan intelijen<br/>           3.Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini<br/>           4.Laporan hasil konsolidasi</p> |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B07<br/>           1.Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel<br/>           2.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>   | <p>B07<br/>           1.Laporan kegiatan Intelijen<br/>           2.Laporan hasil konsolidasi</p>  |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | <p>B08</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel</li> <li>2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</li> </ol>   | <p>B08</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Laporan kegiatan Intelijen</li> <li>2.Laporan hasil konsolidasi</li> </ol>  |                  |
|     |                |                       |                     | <p>B09</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</li> <li>2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</li> <li>3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</li> </ol> | <p>B09</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</li> <li>2. Laporan kegiatan intelijen</li> <li>3. Laporan hasil konsolidasi</li> </ol> |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|--|------------------|
|     |                |                       |                     | B10<br>1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel<br>2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arahkebijakan Intelijen Pemasarakatan  | B10<br>1.Laporan kegiatan Intelijen<br>2.Laporan hasil konsolidasi   |                  |
|     |                |                       |                     | B11<br>1.Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel<br>2.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan   | B11<br>1.Laporan kegiatan Intelijen<br>2.Laporan hasil konsolidasi   |                  |
|     |                |                       |                     | B12<br>1. Monev Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban<br>2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel<br>3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan | B12<br>1. Laporan Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini<br>2. Laporan kegiatan intelijen<br>3.Laporan hasil konsolidasi |                  |

| No. | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|--|---|--|--|---|------------------|
| 36  | Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan | Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap | Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan | B01<br>Melakukan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024   | B01<br>Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024      |                  |
|     |  |   |  | B02<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B02<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |
|     |  |   |  | B03<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B03<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |
|     |  |   |  | B04<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B04<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |
|     |  |   |  | B05<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B05<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |
|     |  |   |  | B06<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B06<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|---|------------------|
|     |                |                       |                     | B07<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B07<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |
|     |                |                       |                     | B08<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B08<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |
|     |                |                       |                     | B09<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B09<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |
|     |                |                       |                     | B10<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B10<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |
|     |                |                       |                     | B11<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B11<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |
|     |                |                       |                     | B12<br>Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP | B12<br>Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan |                  |

| No.                    | Target Kinerja   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan   | Target Capaian   | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|------------------------|--|--|---|--|---|------------------|
| <b>DIVISI IMIGRASI</b> |  |  |   |  |   |                  |
| 37                     | Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman | Diimplementasikannya layanan Paspor <i>Online</i> terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik) | Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan Paspor <i>Online</i> secara berkelompok dalam melakukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)<br>Catatan:<br>Data secara kelompok harus dibatasi sebagaimana Eazy paspor dan paspor simpati | B03<br>1. Melaksanakan Sosialisasi dan uji coba Paspor <i>Online</i> kepada masyarakat/lembaga/instansi terkait oleh setiap satuan kerja<br>2. Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan melampirkan dokumentasi | B03<br>1. Kompilasi laporan uji coba dan data pelaksanaan sosialisasi paspor <i>Online</i> oleh Divisi Keimigrasian<br>2. Laporan sosialisasi Paspor <i>Online</i> (per Satuan Kerja) beserta Dokumentasi<br>3. Uji coba kesisteman | DIV IMI          |
|                        |  |  |   | B06<br>1. Penerapan Paspor <i>Online</i><br>2. Evaluasi Penerapan Paspor <i>Online</i> oleh Divisi Keimigrasian kepada Satuan Kerja  | B06<br>1. Laporan Implementasi Paspor <i>Online</i> beserta dokumentasi (per satuan kerja)<br>2. Laporan Evaluasi Implementasi Paspor <i>Online</i> beserta dokumentasi (oleh Divisi Keimigrasian)                                  |                  |
|                        |  |  |   | B09<br>1. Monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis<br>2. Pengumpulan data dan evaluasi  | B09<br>Laporan monitoring dan evaluasi Divisi Keimigrasian kepada satuan kerja terkait implementasi Paspor <i>Online</i> beserta dokumentasinya   |                  |
|                        |  |  |   | B12<br>Penyampaian identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Paspor <i>Online</i>  | B12<br>Dokumen Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan setiap satuan kerja yang direkapitulasi oleh Divisi Keimigrasian   |                  |

| No. | Target Kinerja  | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan  | Target Capaian  | Data Dukung   | Penanggung jawab |
|-----|---|---|--|---|---|------------------|
| 38  | Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di Wilayah Indonesia | Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i> ) | Adanya informasi dan data tentang Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i> )     | B03<br>1. Pembentukan tim klasifikasi SDM<br>2. Pembentukan Tim pelatih teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i> )<br>3. Pelatihan Teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i> ) | B03<br>1. SK Tim<br>2. Data SDM yang terklasifikasi untuk dilatih<br>3. Laporan pelaksanaan pelatihan teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i> ) | DIV IMI          |
|     |   |   |  | B06<br>pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i> )   | B06<br>Dokumen Hasil Pendataan  |                  |
|     |   |   |  | B09<br>Monitoring Pelaksanaan pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i> )  | B09<br>Dokumen hasil monitoring   |                  |
|     |   |   |  | B12<br>Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i>  | B12<br>Laporan Evaluasi dan Dokumentasi   |                  |
| 39  | Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya   | Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing                            | Terselenggaranya data penjamin virtual bagi orang asing dan kegiatannya yang memerlukan keberadaan orang asing | B03:<br>1. Pembentukan tim pendataan penjamin orang asing<br>2. Rapat dengan K/L terkait yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan perusahaan / organisasi   | B03:<br>1. Sk Tim<br>2. Laporan kegiatan hasil rapat pembahasan   | DIV IMI          |
|     |   |   |  | B06:<br>1. Pelaksanaan pendataan penjamin orang asing<br>2. pengecekan lapangan keberadaan penjamin orang asing di daerah   | B06:<br>1. Hasil pendataan penjamin orang asing<br>2. Laporan hasil pengecekan lapangan keberadaan penjamin orang asing di daerah   |                  |

| No. | Target Kinerja | Kriteria Keberhasilan | Ukuran Keberhasilan | Target Capaian   | Data Dukung  | Penanggung jawab |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------|--|--|------------------|
|     |                |                       |                     | B09:<br>Monitoring konsistensi hubungan penjamin dengan orang asing yang dijamin   | B09:<br>Laporan hasil monitoring                                       |                  |
|     |                |                       |                     | B12:<br>Monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran aturan keimigrasian | B12:<br>Rekapitulasi laporan hasil monitoring, evaluasi dan penindakan |                  |


 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
 YASONNA H. LAOLY